

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan mengenai permasalahan yang di analisis, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Dinas PUPR dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:
 - a. Pengawasan terhadap perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jembatan
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan dan rehabilitasi jembatan dengan memperhatikan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)
 - c. Pengawasan terhadap pemeliharaan atas pembangunan dan rehabilitasi jembatan.
2. Kendala-kendala yang ditemukan oleh Dinas PUPR terhadap satu dari empat jembatan yang pembangunannya dilakukan tidak sampai selesai seperti tiga jembatan lainnya yang di bahas dalam penulisan ini yaitu:
 - a. Penganggaran

Jembatan Kapecong merupakan jembatan yang baru di bangun dengan menggunakan dana dari APBD, pelaksanaan dalam pembangunan jembatannya secara keseluruhan belum selesai, namun secara bertahap sudah selesai, yang mana pada tahun 2023 lalu diadakan pembangunan khusus untuk fondasi dan bagian bawah jembatan di salah satu sisi sungai. Pembangunan yang seperti ini terjadi dikarenakan keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja, sehingga tidak dapat mendukung

- pembangunan jembatan hingga selesai dan dapat digunakan oleh masyarakat.
- b. Rusaknya daerah aliran sungai, daerah aliran sungai yang rusak menjadi salah satu kendala dalam pembangunan Jembatan Kapecong.
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan yaitu:
- a. Untuk mengatasi kendala dalam penganggaran, Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman telah menganggarkan kembali dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan jembatan Kapecong. Dan pembangunan terhadap jembatan Kapecong akan dilanjutkan kembali pada tahun 2024 dengan APBD tahun 2024.
 - b. Dalam mengatasi kendala terkait dengan rusaknya daerah aliran sungai, Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan koordinasi dengan pihak balai sungai untuk membantu mengamankan sungai agar konstruksi sungai dapat terjaga.

B. Saran

Sebagai penulis, dalam pembahasan ini saya menyarankan:

1. Agar Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman dapat meningkatkan perannya selaku lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengawasan pembangunan infrastruktur publik, terutama jembatan sebagai penghubung antar wilayah

2. Agar Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman dapat melakukan inovasi-inovasi terbaru terhadap pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang terpilih pada pemilu 2024 dapat menganggarkan kembali pembangunan Jembatan Kapecong hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Pangerang Moenta, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- A. Muin Fahmal, 2013, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Total Media, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Supriyadi, 2007, *Jembatan*, Cet 4, Beta Offset, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chay Asdak, 2023, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Fitryane Lihawa, 2017, *Daerah Aliran Sungai Alo Erosi Sedimentasi dan Longsoran*, Deepublish, Yogyakarta
- Hadi Prabowo, 2022, *Birokrasi dan Layanan Publik*, Bimedia Pustaka Utama, Bandung
- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2018, *Ilmu Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Rahman Mulyawan, 2015, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, UNPAD Press, Bandung
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Wiztian Yoetri dkk, 2015, *Padang Pariaman Dalam Pembangunan*, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Padang Pariaman

W. Riawan Tjandra, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2025

C. Sumber Lain

Delviana, 2022, "Pelaksanaan Kontrak Kontruksi Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT. Bunga Raya Lestari Dalam Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Wilayah Sumbawa I", *Jurnal Private Hukum Universitas Mataram*, Vol 2, No 1

Hukum Online, 2023, *Asas Otonomi Daerah Dan Penjelasannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomilt64c23fc402543/>

<https://repository.uin-suska.ac.id/4080/3/BAB%20II.pdf>

<https://pupr.padangpariamankab.go.id/home/halaman/binamarga>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Pariaman

[https://repository.fisip.unla.ac.id/browse/download/93#:~:text=Menurut%20David%20Berry%20\(2003%3A105,yang%20menempati%20kedudukan%20sosial%20tertentu](https://repository.fisip.unla.ac.id/browse/download/93#:~:text=Menurut%20David%20Berry%20(2003%3A105,yang%20menempati%20kedudukan%20sosial%20tertentu)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221108-siapa-kah-yang-dimaksud-pe-nyelenggara-negara-dalam-kasus-pidana-korupsi>

<https://dpupkp.slemankab.go.id/tugas-dan-fungsi>

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan>

<https://pratamamedia.com/jembatan-warna-sebagai-objek-pariwisata/>

<https://www.suarantb.com/2023/12/04/jadi-daya-tarik-wisata-sejarah-jembatan-gantung-peninggalan-kolonial-belanda-di-desa-kebon-ayu/>

<https://www.medcom.id/properti/arsitektur/RkjlLR6N-5-jembatan-dengan-arsitektur-memukau-di-dunia>